

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU PETUGAS DALAM PENANGANAN KASUS
KEKERASAN PADA ANAK DI P2TP2A (PUSAT PERLINDUNGAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK) KABUPATEN SIDOARJO

AHADIN SYARIFUDIN FAHMI – 25010110110023

(2014 - Skripsi)

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terjadi peningkatan kekerasan terhadap anak. Baik secara seksual, fisik maupun eksploitasi seksual komersil. Pada 2012 terdapat 746 kasus. Jumlah ini meningkat 200 % dari tahun sebelumnya dengan jumlah kasus sebanyak 329 kasus. Sejak Januari hingga Oktober 2013, jumlah kasus tersebut mencapai 525 kasus atau 15,85 persen dari kasus yang ada. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak biasanya disebut sebagai kasus gunung es, karena dibalik jumlah kasus yang terungkap ternyata masih banyak kasus yang tidak terungkap. Data tersebut menunjukkan bahwa masih belum adanya perlindungan yang maksimal bagi perempuan dan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran perilaku petugas dalam penanganan kasus kekerasan di P2TP2A Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif. Sampel penelitian terdiri dari 5 orang dari unsur konselor di P2TP2A Sidoarjo yaitu manager kasus (ketua harian), koordinator divisi pengembangan anak, coordinator divisi pendampingan korban, sekretaris, dan bendahara. Analisa data dilakukan dengan 4 tahapan : transkrip, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Dari hasil penelitian diketahui terjadinya peningkatan kasus kekerasan pada anak di Sidoarjo, hal ini dikarenakan pengetahuan masyarakat kurang, Dan sosialisasi penanganan kasus korban tindak kekerasan masih belum terlaksana secara rutin. Pengetahuan dan sikap petugas yang di dukung dengan fasilitas pendukung yang baik, proses sosialisasi yang memiliki keberlanjutan, serta bimbingan dan pengawasan dari instansi terkait yang berjalan baik akan sangat membantu dalam optimalisasi penanganan kasus korban tindak kekerasan di P2TP2A Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diharapkan segera membentuk peraturan daerah yang lebih responsif gender sehingga implementasi penanganan kasus kekerasan pada anak berjalan secara optimal

Kata Kunci: kekerasan anak, penanganan kasus